



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG
BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG BERSIFAT WAJIB DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA PEKANBARU
TAHUN ANGGARAN 2014
UNTUK BULAN FEBRUARI DAN MARET 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2014 dan telah disepakati oleh DPRD Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 07 Oktober 2013;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 105A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. bahwa untuk menjamin kelangsungan pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka sambil menunggu hasil Evaluasi Rancangan APBD Kota Pekanbaru Tahun 2014 oleh Pemerintah Provinsi Riau, perlu disediakan kredit anggaran untuk jangka waktu sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pekanbaru Tahun 2014;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Dana Belanja Yang Bersifat Mengikat dan yang Bersifat Wajib dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014 untuk Bulan Februari dan Maret 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG BERSIFAT WAJIB DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2014 UNTUK BULAN FEBRUARI DAN MARET 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Riau
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekanbaru.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
8. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
9. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah untuk membiayai belanja daerah atas beban APBD yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib sebelum diundangkannya Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib dari APBD Tahun Anggaran 2014 untuk bulan Februari dan Maret 2014.

BAB IV PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG BERSIFAT WAJIB

Pasal 4

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dari APBD Tahun Anggaran 2014 untuk bulan Februari dan Maret 2014, terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung untuk belanja pegawai terdiri dari gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Belanja Langsung, meliputi :
 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telepon, air, listrik dan kawat/ faksimili/ internet;
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaharaan Dinas/Operasional
 3. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional untuk belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas;
 4. Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan untuk belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas.
 5. Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.
 6. Pembayaran Honorarium Tenaga Harian Lepas bagi Tenaga Honorer

Pasal 5

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak melebihi kebutuhan belanja 1 (satu) bulan atau 1/12 (satu per dua belas) APBD Tahun 2014.

Pasal 6

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan I Tahun Anggaran 2014.

Pasal 7

Apabila sampai dengan Bulan April 2014, APBD belum di perdakan, maka untuk penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib Bulan April 2014 mengacu kepada penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib Bulan Februari dan Maret 2014.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2014 tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 3 Februari 2014

WALIKOTA PEKANBARU *sp*



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR ..!!..

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN | 79.883.258.450 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | Program Pendidikan Luar Biasa | |
| | - Kegiatan Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan | |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 8.331.672.870 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| 3 | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | 26.115.936.970 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| 4 | DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA | |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| 5 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 1.518.773.240 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| | Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | |
| | - Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran | |
| | - Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran | |

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 6 | DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN | 900.374.770 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| | Pemanfaatan Ruang | |
| | - Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang | |
| | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | |
| | - Pengawasan Pemanfaatan Ruang | |
| 7 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 1.088.905.810 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| 8 | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3.778.663.620 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | |
| | - Kegiatan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan | |
| | - Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat | |
| | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | |
| | - Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan | |
| | Program peningkatan pelayanan angkutan | |
| | - Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamatan penumpang | |
| | - Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya | |
| | - Kegiatan Penataan Tempat-Tempat Pemberhentian Angkutan Umum | |
| | - Kegiatan Penciptaan dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal | |
| 9 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP | 610.481.990 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | |
| | - Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan | |
| | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | |
| | - Kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair | |

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 10 | DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | 9.117.242.400 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | |
| | - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan | |
| | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | |
| | - Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah | |
| | - Pengembangan dan Penataan Tempat Pembuangan Akhir Sampah | |
| | - Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan | |
| | - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | |
| | - Pengembangan teknologi pengolahan persampahan | |
| | - Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan | |
| | - Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | |
| | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | |
| | - Penataan RTH | |
| | - Pemeliharaan RTH | |
| | - Peningkatan Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan lingkungan | |
| 11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1.071.006.580 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| | - Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan | |
| 12 | DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN | 800.115.860 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| | Program pengelolaan areal pemakaman | |
| | - Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman | |
| 13 | DINAS TENAGA KERJA | 1.086.089.990 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 14 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH | 679.410.220 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| 15 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 894.879.210 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| | Program Pengembangan Nilai Budaya | |
| | - Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah | |
| | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | |
| | - Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sara dan Prasarana Pariwisata | |
| 16 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1.216.373.910 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Penyediaan Tenaga Kebersihan dan Pengamanan Kantor | |
| 17 | BADAN KESBANG DAN POLITIK | 726.708.650 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Penyediaan Tenaga Kebersihan dan Pengamanan Kantor | |
| 18 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 2.351.373.350 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | |
| | - Kegiatan Penyediaan Tenaga Kerja Pengamanan dan Kenyamanan Lingkungan | |
| 19 | DPRD | 1.338.986.920 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 20 | KDH & WKDH | 63.269.440 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| 21 | SEKRETARIAT DAERAH | 29.419.708.920 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan | |
| | Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi | |
| | - Kegiatan Penyusunan Sistem informasi dan informasi layanan Publik | |
| 22 | SEKRETARIAT DPRD | 6.848.662.310 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | |
| | - Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor | |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | |
| | - Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan | |
| 23 | INSPEKTORAT KOTA | 676.894.630 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | Program Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | |
| | - Kegiatan Pengawasan Internal secara Berkala (Pemeriksaan Reguler) | |
| 24 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 1.044.187.570 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | |
| | - Seleksi penerimaan calon PNS | |
| | - Kegiatan Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS | |

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 25 | DINAS PENDAPATAN DAERAH | 2.615.874.140 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor | |
| 26 | BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL | 687.576.360 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor | |
| | Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan, Perizinan dan Non Perizinan | |
| | - Kegiatan Koordinasi Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | |
| 27 | KECAMATAN PEKANBARU KOTA | 793.388.630 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | |
| | - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | |
| 28 | KECAMATAN SENAPELAN | 798.338.620 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | |
| | - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | |
| 29 | KECAMATAN SUKAJADI | 870.730.400 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | |
| | - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | |

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 30 | KECAMATAN SAIL | 538.959.300 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | |
| | - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | |
| 31 | KECAMATAN LIMAPULUH | 633.008.810 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | |
| | - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | |
| 32 | KECAMATAN RUMBAI | 1.121.010.570 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | |
| | - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | |
| 33 | KECAMATAN RUMBAI PESISIR | 641.714.280 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | |
| | - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | |
| 34 | KECAMATAN BUKIT RAYA | 748.964.970 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | |
| | - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | |

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 35 | KECAMATAN TAMPAN | 1.031.785.430 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | |
| | - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | |
| 36 | KECAMATAN TENAYAN RAYA | 761.136.110 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | |
| | - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | |
| 37 | KECAMATAN PAYUNG SEKAKI | 534.556.440 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | |
| | - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | |
| 38 | KECAMATAN MARPOYAN DAMAI | 859.729.520 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | |
| | - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | |
| 39 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 440.000.235 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja langsung | |
| 40 | BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN | 743.400.650 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| 41 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | 1.365.585.140 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | |
| | Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Lesetaraan Gender, - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | |
| | - Kegiatan Kota Layak Anak | |
| | Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan | |
| | - Kegiatan Fasilitasi Dharma Wanita | |
| | Program Keluarga Berencana | |
| | - Kegiatan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin | |
| | Program Kesehatan Reproduksi Remaja | |
| | - Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) | |
| | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | |
| | - Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa | |
| 42 | BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | 389.442.960 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | |
| | - Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah | |
| 43 | DINAS PERTANIAN | 859.259.730 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| 44 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1.018.348.970 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | |
| | - Kegiatan Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen | |
| | Program Peingkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | |
| | - Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | |
| | | |
| 45 | DINAS PASAR | 1.514.586.920 |
| | Belanja Tidak Langsung | |
| | - Gaji dan Tunjangan | |
| | Belanja Langsung | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | |
| | - Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor | |
| | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | |
| | - Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | |

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 3 Februari 2014

WALIKOTA PEKANBARU

H FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR .11...